

HUMANISASI PENDIDIKAN DALAM PEMBENTUKAN KESADARAN KEBERAGAMAN UMAT LINTAS AGAMA DI LAMONGAN

Upik Khoirul Abidin

Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya, Indonesia

E-mail: tuanabi87@gmail.com

Abstract: The discourse of interreligious harmony and tolerance has been widely discussed within countless forums. However, the phenomenon of religious disharmony, which is among other marked with social clashes, has been erroneously manipulated into intergroup conflicts among interreligious adherents. Such interreligious disharmony, viewing from simplistic category, has been commonly caused by two factors. The first is an internal factor, i.e. the factor which influences a person to behave based on his/her understanding to religious doctrines he/she subscribes such as radical-extreme, subjective-fundamental, exclusive, and literal behaviors. The second is an external factor, i.e. hedonistic and opportunistic behaviors. The article seeks to discuss interreligious harmony in the Village of Balun, Turi, Lamongan. The village is a home to three different religions, namely Islam, Christianity, and Hinduism. Regardless of such difference the Balun people have successfully created harmony among them. The study finds that there has been sort of values transformation of humanism education in the village. The values such as human rights, tolerance, solidarity, familial relationship, and social justice are culturally transformed through what so-called the Forum of Solidarity for Balun People (*Forum Keakeraban Warga Balun/FKWB*).

Keywords: Humanization; awareness; plurality of religion; interreligious harmony.

Pendahuluan

Artikel ini menggarisbawahi pentingnya implementasi dan transformasi nilai-nilai pendidikan humanisme dalam menciptakan harmoni antarumat beragama. Argumen ini didasarkan pada suatu kebutuhan mendesak bahwa keharmonisan antarumat beragama di

Indonesia perlu dikembangkan dan digalakkan melalui pendidikan agama yang berwawasan multikultural di setiap jenjang, mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Salah satu doktrin yang penting adalah mengajarkan kepada anak didik bahwa agama/keyakinan yang dianutnya adalah yang paling benar, tetapi di sisi lain harus ditekankan pula bahwa mereka harus mengakui serta menghormati agama/keyakinan lain yang dianggap benar oleh pemeluknya. Harmoni yang terbangun hendaknya merupakan bentuk dan suasana hubungan yang tulus yang didasarkan pada motif-motif suci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penguatan terhadap kualitas harmoni hubungan antarumat beragama yakni hubungan yang serasi, selaras, saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi, dan tenggang rasa.

Penguatan terhadap kualitas harmoni tersebut semestinya juga diarahkan pada pengembangan nilai-nilai dinamis yang direpresentasikan dengan suasana hubungan interaktif, bergerak, bersemangat dan bergairah dalam mengembangkan nilai kepedulian, kearifan, dan kebajikan bersama. Salah satu upaya untuk membangun kerukunan antarumat beragama yaitu dengan adanya komunikasi yang baik antarpemeluk agama, sehingga tiap-tiap pemeluk agama merasa memiliki kedudukan yang sama, saling menghormati, menghargai pandangan dan pendapat pemeluk agama lain. Ini merupakan salah satu jembatan dalam membangun komunikasi positif sebagai upaya membangun kerukunan antarumat beragama. Di antara penelitian terdahulu yang membahas tentang pentingnya menjaga kerukunan umat beragama adalah penelitian yang berjudul *Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali*¹ yang ditulis oleh Kunawi.

Menurut Kunawi, kondisi multietnis adalah dimensi keragaman yang hakikatnya memiliki dua sisi potensial yang mampu mewujudkan keindahan warna-warni yang tidak membosankan di satu sisi, namun di sisi lain mempunyai potensi konflik. Potensi yang terakhir disebut perlu dikelola dengan baik dan bijak agar tidak menjadi kenyataan. Keragaman budaya di Denpasar—dan tentunya di banyak tempat—merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karenanya untuk menjaga kerukunan antarumat beragama perlu adanya keterlibatan semua pihak, baik—misalnya—melalui lembaga pendidikan maupun jejaring sosial seperti

¹ Selengkapnya lihat dalam Kunawi, “Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali”, *Islamica*, Vol. 8, No. 1 (September, 2013).

LSM. Dalam rangka meneguhkan kembali kerukunan antarumat beragama (Islam-Hindu), masyarakat Denpasar Bali sepakat untuk menghidupkan tradisi yang pernah dikembangkan oleh nenek moyang mereka yaitu tradisi “menyama braya”. Tradisi ini dikembangkan melalui jalur politik, budaya, dan sosial.²

Meski demikian, berbagai fakta di lapangan menunjukkan bahwa konflik kekerasan yang mengatasnamakan agama masih sering terjadi di negeri ini. Wilayah Jawa Timur, misalnya, yang notabene merupakan “rumah” bagi berbagai agama dan aliran kepercayaan juga masih mengalami berbagai tragedi konflik bernuansa agama yang berujung pada hilangnya penghargaan terhadap agama dan keyakinan lain, dan bahkan mazhab lain dalam satu agama yang sama. Munculnya beberapa kasus seperti peristiwa “Ngawi Kelabu” pada tanggal 29 November 2001³ dan—yang masih lekat dalam ingatan masyarakat Jawa Timur—peristiwa penyerangan sekelompok masyarakat non-Syiah terhadap kelompok Syiah di saat yang disebut terakhir melakukan perayaan lebaran ketupat warga Syiah di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Sampang pada tanggal 26 Agustus 2012⁴ adalah sedikit dari berbagai eksemplar tentang kekerasan “berbaju” agama di propinsi yang justru selama ini dikenal sangat ramah dan toleran tersebut.

Berkaca dari kasus-kasus yang terjadi, bisa dilihat bahwa kesadaran masyarakat terhadap perbedaan dan keragaman masih sangat kurang. Harus diakui bahwa perbedaan agama—dan perbedaan di banyak sisi kehidupan—memang ada dan merupakan sebuah keniscayaan (baca: *sunnat Allâh*). Meski demikian, yang sebenarnya penting untuk dikedepankan adalah kesadaran bahwa perbedaan bukan sesuatu yang harus dipelihara, melainkan persaudaraan dan harmonilah yang harus dibangun dan dilanggengkan di antara umat beragama.⁵ Menjadi hal yang urgen, dengan demikian, untuk menanamkan kesadaran dalam diri setiap individu tentang pentingnya menghormati perbedaan dan pluralitas.

² Ibid.

³ Ahmad Rubaidi, *et. al.*, *Jalan Lain Perdamaian Peace Building Berbasis Komunitas* (Surabaya: Diantama Press, 2005), 3.

⁴ Selengkapnya lihat dalam <https://m.tempo.co/read/news/2012/08/27/058425697/kronologi-penyerangan-warga-syiah-di-sampang>. Diakses 4 Agustus 2016.

⁵ Priyanahadi Sindhunata, *Pergulatan Intelektual dalam Era Kegelisahan* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 32.

Dalam kaitannya dengan konflik bernuansa agama, pemerintah—melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama—dituntut untuk berperan aktif dan positif dalam rangka menciptakan suasana harmonis antarumat beragama. Dalam konteks ini, salah satu peran penting yang dimainkan pemerintah adalah melalui pendidikan. Pendidikan dimaksud adalah pendidikan multikultural yang hadir untuk membuat manusia berhati lembut, berbudi luhur, saling mengasihi antarsesama⁶, serta mampu dan mau menghargai dirinya sendiri dan orang lain tanpa membedakan golongan, terutama agama.

Peran penting pendidikan multikultural (baca: pendidikan humanis) dapat dilihat, di antaranya, dalam penelitian berjudul *Studi Normatif Pendidikan Islam Multikultural* yang dilakukan oleh Asrofil Amar. Amar, dalam tulisannya, menegaskan bahwa melihat konteks Indonesia yang majemuk dari segi suku, agama, budaya, bahasa dan kepentingan politik, maka kurikulum pendidikan agama harus memberikan materi pendidikan multikultural, yakni materi yang memberikan landasan pengetahuan tentang bagaimana seorang individu hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk (plural) tersebut.⁷ Generasi muda harus diajarkan cara hidup yang baik di tengah pluralitas bangsanya. Artinya, ia mampu hidup baik dalam internal kelompoknya maupun eksternal kelompok lain serta selalu bisa hidup damai dengan lingkungannya.

Penulis ingin menambahkan bahwa, kaitannya dengan menciptakan relasi yang baik dan bertanggungjawab dalam kehidupan sosial-keagamaan, generasi muda perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini mengingat karena mereka adalah penerus kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Dalam konteks ini, diperlukan usaha berkesinambungan oleh semua pihak dalam mentransformasikan nilai-nilai humanisme kepada generasi muda. Apabila nilai-nilai humanisme tersebut berhasil ditanamkan dalam setiap individu anak bangsa, maka diharapkan masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini tidak akan lagi diwarnai dengan konflik dan kekerasan, terutama yang bernuansa agama dan etnis.

⁶ Forum Mangunwijaya IV, *Penjarahan Panjang HUMANISME Mangunnijaya* (Jakarta: Kompas, 2009), 88.

⁷ Selengkapnya lihat dalam Asrofil Amar, “Studi Normatif Pendidikan Islam Multikultural”, *Islamica*, Vol. 4, No. 2 (Maret, 2010).

Humanisasi Pendidikan

Hakikatnya, pendidikan adalah suatu proses humanisasi (memanusiakan manusia) yang mengandung implikasi bahwa tanpa pendidikan manusia tidak akan menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya dan seutuhnya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pentingnya pendidikan humanisme, yang dimaknai sebagai potensi (*kekuatan*) individu untuk mengukur dan mencapai ranah ketuhanan (*transendensi*) serta mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial (*hubungan horisontal*). Humanisme dalam dunia pendidikan adalah proses pendidikan yang lebih memperhatikan aspek potensi manusia sebagai makhluk berketuhanan dan makhluk berkemanusiaan serta individu yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mengembangkan potensi-potensinya. Di sinilah urgensi pendidikan sebagai proyeksi kemanusiaan (humanisasi).⁸

Melalui pendidikan, tingkat kesadaran manusia untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian mulai meningkat, sebab untuk menciptakan kerukunan dan kesatuan tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan adanya keberagaman (pluralitas) penduduk di dunia baik dari segi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Melalui pendidikan pula manusia bisa membuka diri untuk mengakui bahwa perbedaan itu memang ada dan memiliki kesadaran tinggi dalam memahami nilai-nilai keragaman agama dan juga pemahaman bahwa manusia itu merupakan makhluk yang mulia yang diciptakan dalam sebaik-baik bentuk seperti disinyalir dalam firman Allah dalam al-Qur'ân surat al-Tîn [95]: 4. Ayat tersebut menegaskan bahwasanya manusia pada dasarnya diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Artinya, meskipun mereka berbeda-beda baik dari segi ras, suku, dan agama, manusia satu dengan yang lainnya harus saling menghormati dan menghargai karena mereka diciptakan sama. Ini yang juga dianjurkan dalam tujuan pendidikan humanis yang mengutamakan tujuan ideal memanusiakan manusia.

Dari beberapa contoh konflik yang berlatarbelakang perbedaan agama/keyakinan dapat disinyalir bahwa di daerah tersebut kemungkinan tidak terdapat usaha transformasi nilai-nilai pendidikan humanisme sehingga konflik dengan mudah timbul. Hal ini sangat berbeda dari apa yang penulis amati di Desa Balun, Kecamatan Turi, Lamongan yang

⁸ Bambang Sugiharto, *Humanisme dan Humaniora: Relevansinya bagi Pendidikan* (Bandung: Jelasutra, 2008), 343.

menjadi lokus penelitian. Di tempat tersebut penulis tidak melihat terjadinya konflik terbuka,⁹ padahal desa tersebut dihuni oleh penganut tiga agama berbeda yaitu agama Islam, agama Kristen, dan agama Hindu. Meski demikian masyarakat Balun mampu menjaga keharmonisan hubungan di tengah keberagaman agama tersebut. Inilah yang menjadi alasan utama penulis tertarik melakukan penelitian di desa tersebut.

Kembali kepada isu humanisasi pendidikan bahwa nilai-nilai dan sikap dasar manusia yang ingin diwujudkan melalui pendidikan humanistik¹⁰ yaitu:

- a. Manusia yang menghargai dirinya sendiri sebagai manusia;
- b. Manusia yang menghargai manusia lain seperti halnya dia menghargai dirinya sendiri;
- c. Manusia memahami dan melaksanakan kewajiban dan hak-haknya sebagai manusia;
- d. Manusia memanfaatkan seluruh potensi dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya;
- e. Manusia menyadari adanya Kekuatan Akhir yang mengatur seluruh hidup manusia.

Selanjutnya, nilai-nilai pendidikan humanisme dapat diterapkan melalui:¹¹ *pertama*, toleransi yaitu sikap yang dikembangkan untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi memungkinkan adanya kesadaran setiap individu atau kelompok untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda. *Kedua*, pluralisme yaitu sikap untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan

⁹ Meskipun kemungkinan potensi ke arah konflik ada. Hal ini karena—mengacu pada Teori Konflik—di dalam masyarakat “se sehat” apapun, potensi bagi terjadinya konflik tetaplah ada. Hal yang kemudian membedakan adalah, menurut penulis, bagaimana masyarakat mengelola potensi yang ada. Jika ia dikelola dengan baik maka kemungkinan munculnya konflik terbuka bisa dicegah dan sebaliknya jika potensi itu dibiarkan maka konflik akan benar-benar terjadi.

¹⁰ Selengkapnya lihat dalam “Sebuah Renungan untuk Pendidikan Masa Depan”, *Majalah Widya*, Agustus, 2006, 16.

¹¹ Abdul Rouf, *NU dan Civil Islam di Indonesia* (Jakarta: Intimedia, 2010), 146-62.

itu sebagai bagian dari keniscayaan hidup. Inti dari sikap pluralisme adalah dialog sebagai simbol keterbukaan, baik internal umat beragama ataupun antarumat beragama. *Ketiga*, Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu salah satu pilar kewargaan masyarakat yang hakikatnya adalah membangun kebebasan yang manusiawi. HAM dalam konteks tulisan ini bermakna bahwa manusia berhak memilih agamanya berdasarkan keyakinannya. Al-Qur'ân, dalam surat al-Baqarah ayat 256 dan surat al-Kâfirûn ayat 6, misalnya, dengan tegas mengakui kebebasan manusia untuk beragama tanpa disertai paksaan. Kebebasan memilih agama, dalam pandangan Islam, merupakan hak yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap manusia. Dengan demikian tidak dibenarkan jika suatu negara, kelompok, atau bahkan perorangan memaksakan agama tertentu kepada orang atau kelompok lain.

Keempat, keadilan sosial yang berarti keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk beragama dan berkeyakinan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan, termasuk agama, pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah termasuk di dalamnya kebebasan menjalankan agama. Nilai keadilan sendiri adalah salah satu nilai-nilai kemanusiaan asasi yang dibawa oleh Islam dan dijadikan sebagai pilar kehidupan baik pribadi, rumah tangga maupun masyarakat. Islam menjadikan keadilan di antara manusia sebagai salah satu *hadaf* (tujuan) utama risalah langit sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ĥadîd ayat 25. Islam sangat menekankan setiap Muslim untuk berlaku adil, yaitu dengan menyeimbangkan antara hak pribadinya (personal), hak Tuhannya (vertikal-transendental) dan hak orang lain (horizontal-sosial).

Dapat disimpulkan dari pemaparan di atas bahwa, melalui nilai-nilai humanistik, pendidikan dikembalikan lagi kepada tujuan asasinya yaitu pemuliaan manusia. Semua manusia diterima dan dihargai harkat dan martabatnya. Tujuan pendidikan tidak direduksi menjadi hanya sebagai alat pemenuhan kebutuhan dunia kerja atau alat bagi orang dewasa untuk *menjejalkan* sekeranjang pengetahuan tanpa makna dan pemahaman yang semestinya kepada generasi muda. Pendidikan, dengan demikian, memiliki tujuan yang jauh lebih mulia daripada itu semua. Melalui

pendidikan yang humanis pula anak didik diharapkan memiliki pemahaman yang benar dan baik atas nilai dirinya sebagai manusia, baik sebagai individu, makhluk sosial, dan makhluk bertuhan.

Untuk membentuk “manusia utuh” yang, di antara cirinya, mampu memanusiakan manusia serta memiliki kesadaran terhadap keberagaman agama, ada beberapa tahapan yang bisa ditempuh, yaitu:¹² *pertama, learning to know*. Tahap ini membantu peserta didik untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan sistematis guna memahami realitas diri, sesama dan dunia. Dalam konteks ini, pendidik hendaknya mampu menjadi fasilitator bagi peserta didiknya. Peserta didik dimotivasi sehingga timbul kebutuhan dari dirinya sendiri untuk memperoleh informasi, keterampilan hidup (*income generating skills*) dan sikap tertentu yang ingin dikuasainya. *Kedua, learning to do*. Tahap ini membantu peserta didik untuk mampu menerapkan apa yang diketahui dan dipahami ke dalam praksis untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Peserta didik dilatih untuk secara sadar mampu melakukan suatu perbuatan atau tindakan produktif dalam ranah pengetahuan, perasaan dan penghendakan. Peserta didik dilatih untuk bersikap aktif-positif daripada aktif-negatif. Dengan demikian, pengajaran tidak hanya menekankan aspek intelektual.

Ketiga, learning to be. Tahap ini membantu peserta didik menjadi diri sendiri yang otentik dan mandiri dan berpegang pada prinsip sehingga tidak mudah digoyahkan serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Setiap peserta didik memiliki harga diri berdasarkan diri yang senyatanya. Peserta didik dikondisikan dalam suasana yang dipercaya, dihargai, dan dihormati sebagai pribadi yang unik, merdeka, dan berkemampuan. Dengan demikian, peserta didik merasakan adanya kebebasan untuk mengekspresikan diri, sehingga terus menerus dapat menemukan jati dirinya.

Keempat, learning to live together. Tahap ini membantu peserta didik memahami perbedaan dan keunikan, memahami dunia orang lain, mampu bersikap terbuka dan toleran, dan bersedia berbagi dengan sesama. Dari sinilah lahir kesadaran dan pemahaman bahwa persatuan dibangun bukan dengan memangkas perbedaan, tetapi dengan menghargai perbedaan dan keunikan masing-masing. Peserta didik diharapkan mampu hidup bersama saling berdampingan, saling bekerja sama, meretas solidaritas lintas batas, dan menghilangkan sikap sektoral

¹² Sugiharto, *Humanisme dan Humaniora*, 344-345.

dan egoisitas.

Kelima, learning to learn. Tahap ini menstimulasi peserta didik untuk terus belajar dan mampu memaknai setiap peristiwa dan pengalaman hidup, terutama pengalaman kontras negatif. Artinya, pengalamanlah yang mendorong para peserta didik untuk mengembangkan daya kreatif dan imajinatif untuk mengubah situasi tidak manusiawi menuju situasi yang lebih manusiawi, bebas dan adil. *Keenam, learning to love.* Tahap ini membantu peserta didik untuk mencintai dirinya sendiri, sesama, lingkungan, dan Tuhan. Di samping itu, peserta didik dibantu untuk mencari, mencintai dan menghayati kebenaran dan kebijaksanaan.

Kondisi Geografis dan Demografis Objek Penelitian

Desa Balun masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Desa ini memiliki luas wilayah 621.103 Ha. Desa Balun berbatasan dengan Desa Ngajungrejo di sebelah utara, Desa Gedong Boyo Untung di sebelah timur, Kelurahan Sukorejo di sebelah selatan, dan Desa Tambak Ploso di sebelah barat.

Desa Balun memiliki keberagaman agama yang cukup menarik. Di desa ini terdapat tiga agama yang dianut oleh masyarakatnya, yaitu agama Islam, agama Kristen, dan agama Hindu. Atas dasar inilah Balun dipilih menjadi objek penelitian. Keberagaman agama yang ada menjadikan desa ini seperti “miniatur” kehidupan keagamaan ideal yang menarik untuk dieksplorasi lebih jauh.

Berdasarkan data monografi desa Balun pada akhir tahun 2009, jumlah penduduk Desa Balun mencapai 4.702, dengan rincian 2.312 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.390 jiwa berjenis kelamin perempuan. Terdapat 1.129 kepala keluarga di desa ini. Meskipun angka-angka tersebut adalah data lama, tapi penulis ingin menggarisbawahi satu hal penting yaitu bahwa Desa Balun memiliki jumlah penduduk yang cukup signifikan untuk membangun desa. Hal ini karena jumlah penduduk, apabila dapat dikelola dengan baik, adalah salah satu *asset* penting bagi pembangunan dan pengembangan desa. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Priyono Tjiptofelijanto (2004) bahwa pembangunan yang hanya bertumpu pada upaya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, melalui proses industrialisasi dan perdagangan memang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas, namun juga berakibat pada peningkatan jumlah pengangguran. Oleh karena itu, menurutnya, pembangunan harus berwawasan kependudukan yang dimaknai sebagai penjabaran dari

strategi pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang dijalankan untuk memenuhi keperluan saat ini tidak serta merta mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Salah satu aspek yang penting untuk di bangun, dalam pembangunan yang berkelanjutan, adalah aspek kerukunan beragama.

Tingkat pendidikan secara umum menggambarkan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi pendidikan masyarakat maka kualitas SDM juga semakin tinggi, walaupun secara kasuistik terdapat fenomena sebaliknya. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Balun dapat dilihat dari data monografi desa berikut ini:

Tabel 1
Penduduk Desa Balun menurut Pendidikan

No	Status Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	148 jiwa
2	Tidak Tamat Sekolah	236 jiwa
3	Tamat SD / sederajat	3.031 jiwa
4	Tamat SLTP / sederajat	717 jiwa
5	Tamat SLTA / sederajat	518 jiwa
6	Sarjana Muda	11 jiwa
7	Sarjana	38 jiwa
8	Pascasarjana	3 jiwa

Dari data pendidikan masyarakat Balun di atas dapat diambil kesimpulan: *pertama*, jumlah penduduk yang memiliki latar belakang pendidikan adalah 4.318 jiwa. Artinya, ada sekitar 384 jiwa yang masih belum atau tidak memiliki latar belakang pendidikan jika mengacu pada angka statistik akhir tahun 2009 dengan jumlah penduduk 4.702 jiwa. *Kedua*, mayoritas penduduk memiliki tingkat pendidikan rendah setingkat SD dan tidak berpendidikan sama sekali. Hal ini memang berbanding lurus dengan rendahnya kualitas SDM masyarakat. Meskipun demikian terdapat fenomena positif yaitu jumlah penduduk dengan pendidikan tamat SLTA atau sederajat mencapai 518 orang, sarjana muda mencapai 11 orang, sarjana 38 orang, dan pascasarjana 3 orang. Jumlah ini, menurut penulis, cukup signifikan bagi sebuah desa yang secara geografis terletak cukup jauh dari pusat pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Sisi positif inilah yang, sekali lagi menurut hemat penulis, dapat dimaksimalkan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya bukan tidak mungkin akan memperbaiki dan menaikkan kualitas SDM di desa tersebut.

Selanjutnya, dilihat dari aspek keragaman agama yang dianut oleh masyarakatnya, Desa Balun dapat dijadikan miniatur yang cukup baik bagi penerapan pluralisme agama. Hal ini karena, walaupun Islam menjadi agama

yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat, penganut minoritas agama-agama lain (yaitu Kristen dan Hindu) tetap mendapatkan tempat yang baik. Lokasi tempat ibadah antara satu dengan lainnya bahkan sangat berdekatan. Tabel berikut menyajikan angka penduduk Desa Balun berdasarkan agama yang dipeluk.

Tabel 2
Penduduk Desa Balun menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3.585 jiwa
2	Kristen	834 jiwa
3	Hindu	283 jiwa

Sejauh pengamatan penulis, kondisi keberagaman agama masyarakat Balun termasuk dalam kategori dinamis. Hal ini, antara lain, dibuktikan dengan letak bangunan antartempat ibadah yang saling berdekatan (berada dalam satu lokasi) di mana Gereja berada di sebelah timur atau depan Masjid dan berjarak sekitar 80 m, sedangkan Pura berada di sebelah selatan atau kanan Masjid dan hanya dipisahkan oleh jalan selebar 4 m. Artinya, Masjid dan Pura hanya berjarak 4 m. Berdekatannya tempat-tempat ibadah ini memberi gambaran bahwa agama turut mencerminkan sendi-sendi kerukunan kehidupan masyarakat Desa Balun. Hal ini karena, selain digunakan sebagai tempat aktivitas keagamaan, tempat-tempat ibadah tersebut sering digunakan juga untuk melaksanakan berbagai aktivitas sosial-kemasyarakatan.¹³

Pluralitas Agama Desa Balun

Desa Balun, sebagaimana telah disinggung di atas, merupakan desa yang cukup unik dalam hal keberagaman agama penduduknya. Hal ini terbukti bahwa di desa tersebut terdapat tiga agama berbeda namun dengan lokasi tempat ibadah masing-masing yang saling berdekatan. Keragaman agama tersebut sangat disadari dengan baik oleh seluruh masyarakat Desa Balun. Masyarakat sangat menjaga pola komunikasi sesama warga, saling menghargai, dan saling menghormati demi mewujudkan suasana keakraban dan kerukunan di tengah-tengah pluralitas.

Kaitannya dengan sikap saling menghormati, penduduk Desa Balun menyadari sepenuhnya bahwa bahwa memeluk agama merupakan hak asasi masing-masing individu. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Sumiati (salah seorang pemeluk agama Islam) bahwa: *Nganut agomo kuwi ya wes dadi urusane dheve-dheve, ojo dipek.sone agomo nang wong liyo.* (Memeluk agama itu *ya* sudah menjadi urusannya sendiri-sendiri, jangan memaksakan agama kepada orang

¹³ *Gambaran Bentuk Objektif Ds. Balun, Kec. Turi, Kab. Lamongan* (Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Balun Kecamatan Turi Tahun 2009).

lain).¹⁴ Pernyataan ini menggambarkan bahwa sebagai penganut agama mayoritas tidak lantas menjadikannya bersikap arogan terhadap kelompok minoritas.

Selain hal tersebut, sebagai kelompok masyarakat yang sangat dominan dari sisi jumlah di Desa Balun, umat Islam juga tidak bertindak semena-mena terhadap kelompok minoritas, yaitu umat Kristen dan umat Hindu, dengan tidak membatasi keterlibatan dua kelompok yang disebut terakhir dalam kegiatan-kegiatan sosial di desa. Sumiati menambahkan: *Terus lek enek kumpulan kumi ya podo gelem kumpul masio seng ngundang bedo agomo*. (Terus kalau ada pertemuan juga pada mau berkumpul meskipun yang mengundang berbeda agama).¹⁵ Hal ini dipertegas dengan adanya keterlibatan dua warga Kristen yang menjadi perangkat Desa Balun, yaitu Heri Suparno (Urusan Keuangan) dan Guwarno (Seksi Ketenteraman dan Ketertiban).¹⁶ Selain keterlibatan warga Kristen dalam susunan kepengurusan desa, keharmonisan warga Balun dapat dilihat dari adanya pembagian bantuan sembako yang mana pemerintah desa tidak membeda-bedakan latar belakang agama. Selama mereka tergolong warga kurang mampu maka akan memperoleh bantuan yang sama.

Satu hal yang, menurut penulis, menarik untuk diungkap dalam tulisan ini adalah bahwa pemahaman yang baik umat Islam di Desa Balun terhadap keragaman agama dilandaskan pada ajaran al-Qur'an surat al-Nahl ayat 93. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak menciptakan manusia hanya sebagai satu umat saja, meskipun jika Dia menghendaki hal itu sangat mudah bagi-Nya. Akan tetapi Allah tidak menghendaki yang demikian. Oleh karena itulah Dia memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih sendiri jalan yang dianggapnya baik. Hanya saja manusia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dia pilih dan lakukan. Menurut Sudarjo (Kepala Desa Balun) ayat inilah yang dijadikan pedoman umat Islam di Desa Balun untuk menghargai perbedaan agama dan demi menjaga kerukunan di desa tersebut. Sudarjo menambahkan bahwa sesungguhnya perbedaan agama memang ada namun itu bukan hal yang substansial. Bagi masyarakat Desa Balun, dia menegaskan, hal yang substansial adalah menghormati keberagaman tersebut untuk menciptakan harmoni.¹⁷

Sukambang (salah satu tokoh agama Hindu) menjelaskan bahwa sebagai kelompok minoritas dia sangat mengapresiasi terhadap sikap yang ditunjukkan oleh kelompok Muslim. Dia menuturkan:

¹⁴ Sumiati, *Wawancara*, Lamongan, 23 Januari 2011.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Peraturan Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan No. 01 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Balun.

¹⁷ Sudarjo, *Wawancara*, Lamongan, 22 Januari 2011.

Saya sangat bangga *mas* dengan kebesaran hati warga Muslim di Balun. Meski kami kelompok kecil, tapi mereka sangatlah menghargai kelompok kami, baik di waktu-waktu beribadah ataupun ketika mengadakan kegiatan-kegiatan lain. Ini sudah mulai dari tahun 1967, *mas*. Jadi sudah seharusnya bagi kami juga menghormati mereka, bahkan sudah menjadi keharusan antarsesama untuk saling menghargai dan menghormati.¹⁸

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa terlepas dari pluralitas keberagamaanya, warga Balun baik kelompok Islam, Kristen, dan Hindu cukup arif dalam menjaga komunikasi antarwarga dan saling tolong menolong dalam kebaikan demi menjaga suasana keakraban dan kerukunan tanpa mencampuradukkan hal-hal mendasar (akidah) dalam agama masing-masing. Hal ini sejalan dengan ajaran al-Qur'ân dalam surat al-Mâ'idah ayat 2 yang memerintahkan umat Islam untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa.¹⁹ Benang merah yang bisa ditarik dari ayat tersebut dan dikaitkan dengan konteks keberagaman di Desa Balun adalah bahwa manusia, tanpa membeda-bedakan agama yang dianutnya, seharusnya saling membantu dalam perbuatan baik. Masyarakat Balun menyadari bahwa urusan memeluk agama merupakan urusan individu manusia dengan Tuhannya yang tidak bisa diintervensi dan dipaksakan.

Pandangan di atas juga menyiratkan bahwa di hadapan Tuhan manusia adalah sama. Aspek yang membedakan mereka hanya kualitas ketakwaan kepada Tuhan. Artinya, dalam aspek lahiriah, mereka tidak seharusnya merasa lebih mulia dan lebih baik dari yang lain. Sikap yang sebaiknya dikedepankan adalah kesadaran bahwa setiap manusia memiliki kekurangan maupun kelebihan. Karena kesadaran ini yang selanjutnya menuntun manusia untuk saling membantu dan bekerjasama mengisi kekurangan tanpa harus membedakan latar belakang keagamaan maupun hal lain, seperti yang terjadi pada masyarakat Balun.

Terlepas dari perbedaan yang ada, masyarakat Balun mampu mewujudkan kerukunan di antara mereka. Bahkan, sebagaimana akan dijelaskan pada bagian selanjutnya, terdapat nilai-nilai humanisme yang oleh warga Balun diimplementasikan dan ditransformasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka bahkan membentuk sebuah wadah non-formal, yang diberi nama Forum Keakraban Warga Balun (FKWB), yang bisa “menjamin” keberlangsungan proses transformasi nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai humanisme yang diimplementasikan oleh warga Balun meliputi Hak Asasi Manusia (HAM), toleransi, keakraban, kekeluargaan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan dan peningkatan kesadaran warga Balun

¹⁸ Sukambang, *Wawancara*, Lamongan, 23 Januari 2011.

¹⁹ Ahmad Sunarto, *Terjemah Riyadhus Shalihin* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 205.

tentang pluralitas. Dengan demikian, masyarakat bisa hidup rukun berdampingan di tengah-tengah keberagaman tersebut.

Dalam konteks keragaman, sosialitas merupakan suatu yang hakiki pada manusia. Manusia bisa dikatakan ada dan hidup karena, dan dalam, hubungannya dengan yang lain. Sejak dini, bahkan, hidupnya sudah ditandai dengan ketergantungannya kepada orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, manusia menjadi sadar bahwa dunianya adalah dunia bersama. Kebersamaan itu dialami dalam penggunaan bahasa tertentu, penepatan adat istiadat dan tradisi yang sama, pelaksanaan tataperaturan moral, agama, dan kebudayaan. Dalam hal-hal yang sangat pribadipun setiap manusia menemukan sesama yang telah ikut membentuk dan mempengaruhi keyakinan-keyakinan hidupnya.

Sosialitas merupakan sesuatu yang meresapi seluruh segi hidupnya sebagai manusia. Dengan perkembangan prosesnya, di luar keluarganya, sosialitas manusia membawa dirinya pada pengetahuan yang lebih luas, terutama dalam hal agama/keyakinan bahwa meskipun dalam peranannya keyakinan manusia masih terpengaruhi oleh individu di luar dirinya, tetapi pengaruh dari dalam dirinya sendiri yang lebih besar mempengaruhi dalam berkeyakinan, sebab manusia adalah makhluk yang bebas.²⁰ Hal ini pula yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Balun dengan sikap menghargai dan menghormati orang lain yang memeluk agama berbeda tanpa disertai sikap dan perasaan bahwa satu golongan lebih baik daripada golongan lain.

Penulis mencoba menafsirkan—tanpa bermaksud bersikap subjektif—bahwa apa yang diyakini dan diimplementasikan oleh warga Desa Balun tersebut mencerminkan kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi dan cita-cita yang pantas diraih oleh setiap individu manusia. Kebebasan menandakan kemandirian sebagai manusia. Manusia disebut “bebas” apabila ia, di antaranya, dapat melepaskan diri dari segala sesuatu yang menghalangi perwujudan dirinya secara penuh. Kebebasan mengandaikan bahwa manusia memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan yang memadai, dan tata nilai yang benar, sehingga ia dapat mengambil sikap hidup yang tepat dalam interaksi dengan lingkungannya, terlebih dalam menyikapi adanya perbedaan agama/keyakinan. Dengan demikian ia dapat melepaskan diri dari kungkungan alam sekitar yang justru membatasi gerakannya. Dari titik ini manusia dapat mengolah dan memanfaatkan kebebasan itu untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan hidupnya dan hidup orang lain.

Selanjutnya, kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi juga mengandaikan bahwa seseorang memiliki suatu pendirian atau prinsip hidup

²⁰ Priyanahadi Sindhunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan* (Kanisius: Yogyakarta, 2000), 190.

yang jelas dan diyakini kebenarannya. Memeluk agama masuk dalam konteks ini. Dengan kata lain, manusia yang satu dengan yang lain pasti tidak akan bisa jika dalam hal beragama dan berkeyakinan diseragamkan hanya kepada satu agama dan keyakinan. Hal ini harus dimaklumi bahwa negara Indonesia mengakui dan menjamin enam agama untuk hidup dan berkembang tanpa adanya pemaksaan. Masyarakat Desa Balun adalah salah satu contoh masyarakat yang menghargai kebebasan tersebut. Mereka mempunyai pendirian bahwa apa yang diyakini oleh setiap individu akan dipertanggungjawabkan, terutama kelak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, masyarakat Balun tidak mempermasalahkan perbedaan agama dalam komunikasi ataupun kebijakan demi menjaga harmoni hubungan di antara mereka.

Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Humanisme di Desa Balun

Bukan merupakan hal yang mudah bagi masyarakat Desa Balun untuk menciptakan kerukunan di tengah-tengah pluralitas yang ada. Di beberapa tempat lain di Jawa Timur terjadi kasus-kasus keagamaan yang menyebabkan kelompok minoritas menjadi “korban”. Di Kecamatan Kota Bojonegoro, misalnya, masyarakat setempat—yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam—menolak alih fungsi bangunan Kantor Gereja Bethany menjadi tempat ibadah. Sementara itu di Jombang, jemaat Gereja Masa Depan cerah terus mengeluhkan tentang sulitnya mendirikan tempat ibadah. Mereka mengaku, walaupun sudah lama mengajukan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), namun hingga saat ini proses tersebut tidak kunjung selesai. Permasalahan yang sama juga dialami oleh Persatuan Gereja dan Lembah Injil Indonesia (PGLII) yang juga masih belum mendapatkan IMB untuk mendirikan tempat ibadah.²¹

Terlepas dari adanya kebijakan tertentu oleh pemerintah terkait dengan pendirian tempat ibadah, beberapa contoh di atas merupakan gambaran kecil tentang adanya konflik lintasagama, yang dapat diartikan sebagai sulitnya menciptakan harmoni antarumat beragama. Hal ini menandakan bahwa masyarakat secara umum masih memiliki tingkat kesadaran tentang keberagaman yang rendah. Inilah yang menjadi alasan bagi pentingnya transformasi nilai-nilai pendidikan humanisme baik secara kultural maupun edukasional dalam tataran non-formal dan terlebih formal.

Eksemplar di atas berbeda dari yang terjadi pada masyarakat Balun di mana mereka menyadari dengan baik adanya perbedaan, sehingga mampu menjaga kerukunan di antara mereka. Dalam rangka menciptakan dan menjaga kerukunan antarumat beragama di wilayahnya, masyarakat Balun menanamkan nilai-nilai humanisme pada diri mereka. Hal ini dilakukan antara lain dengan

²¹ Akhol Firdaus, “Pemkab dan Masyarakat Menolak Pendirian Tempat Ibadah”, *Buletin Syhadah*, XII (Juli, 2010), 1-2.

cara kultural. Artinya, implementasi nilai-nilai humanisme tersebut dilakukan dengan cara non-formal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Balun, ada beberapa nilai humanisme yang mereka implementasikan dalam relasi sosial-keagamaan, yaitu: *pertama* adalah nilai HAM. Masyarakat Balun meyakini bahwa setiap individu manusia bebas untuk menganut dan memeluk agama/keyakinan. Hal ini karena pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, sehingga menentukan pilihan pada keyakinan agama merupakan hak pribadi setiap orang.²² *Kedua* adalah toleransi. Konsep ini dipegang teguh oleh masyarakat Balun. Sudah menjadi keharusan dalam hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural bahwa tidak boleh ada pemaksaan kehendak terhadap orang lain, khususnya yang berkaitan dengan agama/keyakinan. Hal ini karena pemaksaan kehendak terhadap orang lain hanya akan memicu terjadinya konflik.²³ *Ketiga* adalah keakraban. Menurut masyarakat Balun keakraban bisa menimbulkan sikap saling terbuka, sehingga meskipun berbeda agama harus saling menghargai.²⁴

Keempat adalah kekeluargaan. Rasa kekeluargaan menjadikan masyarakat Balun merasa bahwa mereka adalah satu keluarga meski berbeda keimanan. Narasumber yang penulis wawancarai bahkan menegaskan bahwa: *Bukankah kita semua merupakan anak cucu Adam? Itu artinya kita adalah satu keluarga.*²⁵ *Kelima* adalah keadilan sosial. Masyarakat Balun memahami secara baik bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya menjadi sebuah keharusan bagi warganya untuk mendapatkan jaminan keadilan dari segi kebijakan apapun, termasuk dalam memeluk agama. Meskipun masih banyak terjadi konflik agama di tempat-tempat lain, tapi di desa Balun—dengan adanya jaminan keadilan—seluruh warganya bisa saling menjaga satu sama lain.²⁶

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai humanisme melalui cara non-formal memiliki signifikansi dalam membentuk kesadaran keberagaman umat lintasagama. Ini berarti bahwa jika implementasi nilai-nilai humanisme yang dilakukan dengan cara non-formal mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyikapi keberagaman, maka menjadi hal yang bisa dipastikan bahwa tingkat kesadaran keberagaman mereka akan semakin tinggi apabila implementasi nilai-nilai humanisme tersebut dilakukan melalui cara formal. Lebih jauh, semakin tinggi tingkat kesadaran keberagaman, kehidupan masyarakat—terutama kelompok-kelompok

²² Tadi, *Wawancara*, Lamongan, 23 Januari 2011.

²³ Suwito, *Wawancara*, Lamongan, 23 Januari 2011.

²⁴ Sulastri, *Wawancara*, Lamongan, 23 Januari 2011.

²⁵ Sudarjo, *Wawancara*, Lamongan, 23 Januari 2011.

²⁶ Naskan, *Wawancara*, Lamongan, 24 Januari 2011.

minoritas—akan menjadi lebih tenteram, nyaman, dan aman terutama dalam memilih dan menjalankan agama.

Transformasi Nilai Pendidikan Humanisme Masyarakat Balun

Perubahan dalam segi apapun tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Hal ini karena perubahan memerlukan proses yang dapat menjadikannya berubah. Aktor memainkan peranan penting bagi suatu perubahan. Sejalan dengan pandangan ini, proses transformasi nilai-nilai pendidikan humanisme di Balun tidak terlepas dari peran aktor sekaligus metode yang digunakan.

Istilah transformasi sendiri mengandung arti adanya “pelaku” yang mentransfer sesuatu. Dalam dunia pendidikan formal, misalnya, proses transformasi nilai-nilai kepada peserta didik dilakukan oleh guru atau pendidik sebagai agen transformasi. Dalam pendidikan non-formal, agen/aktor transformasi disebut dengan “fasilitator”, “instruktur”, maupun istilah-istilah lain yang semakna. Selain peserta didik yang diharuskan turut berperan aktif, para aktor transformasi (guru/pendidik/ fasilitator/instruktur) merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan transformasi nilai-nilai yang diinginkan. Dengan demikian, tingkat nilai yang diserap oleh peserta didik sangat dipengaruhi oleh tingkat, misalnya, profesionalisme seorang aktor transformasi.

Tidak berbeda dari dunia pendidikan formal, proses transformasi nilai-nilai humanisme di Desa Balun, juga dilakukan oleh para aktor. Di antara aktor transformasi tersebut adalah Sumitpo, Sutarno, Sumito, Sudarjo (tokoh-tokoh Islam), Adi Wiyono, Sukambang, Ngarijo, Tadi (tokoh-tokoh Hindu), dan Sutrisno, Naskan, Suprayitno (tokoh-tokoh Kristen). Nama-nama inilah yang memiliki “tanggung jawab lebih” dibandingkan dengan warga Balun lainnya dalam mentransformasikan nilai-nilai humanisme.

Meskipun demikian hal ini tidak berarti bahwa warga Balun lainnya tidak bertanggung jawab dalam upaya mentransformasikan nilai-nilai tersebut. Mereka terlibat aktif dalam menanamkan nilai-nilai dimaksud. Proses transformasi nilai-nilai humanisme di Balun sendiri dilakukan melalui cara non-formal atau kultural.²⁷ Hal ini berawal dari setiap diadakannya *event* warga seperti kerja bakti, peringatan hari-hari besar keagamaan, dan peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus di mana seluruh warga Balun saling bekerjasama

²⁷ Yang dimaksud dengan cara kultural di sini adalah mulai masuknya Agama Kristen dan Hindu di Balun pada kisaran 1967. Masyarakat pada masa itu yang mayoritas adalah muslim tidak merasa keberatan dengan masuknya dua agama tersebut. Hal ini karena warga yang tertarik masuk ke dalam agama Kristen dan Hindu rata-rata masih saudara mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya dua agama “baru” tersebut, tidak dijumpai konflik sekecil apapun sampai terbentuknya FKWB yang menjadi wadah keakraban warga Besa Balun.

dan saling membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Interaksi dalam kegiatan-kegiatan tersebut ternyata secara tidak langsung telah menyemaikan bibit keakraban, kerjasama, saling mempercayai, penghargaan, penghormatan dan toleransi.

Kebiasaan merayakan Hari Kemerdekaan RI setiap 17 Agustus bahkan secara nyata melahirkan apa yang disebut dengan FKWB yang dijadikan wadah non-formal dalam mentransformasikan nilai-nilai humanisme. Sayangnya, dari semua informan yang penulis wawancarai tidak satupun mengingat dengan pasti awal terbentuknya forum tersebut. Forum inilah yang mengayomi seluruh warga Balun tanpa membedakan agama. Melalui FKWB ini pula warga Balun merasa lebih bisa saling terbuka dalam berpendapat, saling menghargai perbedaan pendapat. Lebih jauh, dari FKWB ini juga telah dirumuskan beberapa kesepakatan antarwarga Islam, Kristen, dan Hindu untuk mempertahankan kerukunan yang sudah terbentuk dari mulai masuknya agama Kristen dan Hindu pada tahun 1967.

Poin paling penting dari kesepakatan-kesepakatan tersebut adalah bahwa seluruh warga Balun harus saling menghargai dan menghormati pada saat penganut agama lain melakukan ibadah. Implementasi dari hal tersebut, misalnya, pada saat penganut Kristen melakukan ibadah setiap hari Minggu pukul 07:00 WIB dan 18:00 WIB²⁸ dan penganut Hindu setiap hari *Wage*²⁹, penganut Islam—yang setiap kali sebelum memasuki waktu salat selalu memutar *qirâ'ah* sebelum *azan* dikumandangkan—tidak akan memutar *qirâ'ah* melainkan langsung mengumandangkan *azan*. Hal yang sama berlaku bagi penganut Kristen dan Hindu di mana mereka tidak akan membuat kegaduhan/keramaian yang bisa mengganggu penganut Islam ketika sedang melakukan salat. Mereka saling menghargai dan menghormati. Sikap seperti inilah yang seharusnya dicontoh oleh seluruh warga dunia, terutama dunia Islam, agar konflik-konflik lintasagama dan/atau bernuansa agama bisa dihindari.

Setiap agama pasti mengajarkan kemuliaan terhadap pemeluknya. Di antara ajaran kemuliaan tersebut adalah bagaimana individu harus berkepribadian yang baik, bagaimana harus bersikap baik, dan bagaimana harus menghadapi perbedaan dengan baik dan bijaksana. Dalam Kristen, misalnya, diajarkan bahwa:

“Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan

²⁸ Lihat *Buletin Warta Jemaat* (Greja Kristen Jawi Wetan Jemaat Lamongan), 10 Oktober 2010.

²⁹ Hari dalam kalender Jawa selain *Pabing*, *Klinon*, *Pon*, dan *Legi*.

menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu”.³⁰

Islam juga, misalnya, mengajarkan bahwa:

“Katakanlah (olehmu Muhammad): “Hai Ahli Kitab! Marilah kita bersatu kata, antara kita, kamu dan kami, bahwa kita tiada menyembah selain Allah, dan bahwa kita tiada mempersekutukan Ia dengan suatu pun, bahwa kita tiada menjadikan antara kita sendiri, tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah: “Saksikan olehmu, bahwa kami orang yang berserah diri kepada Allah”.³¹

Contoh doktrin agama di atas membuktikan kepada kita bahwa setiap agama mengajarkan pemeluknya kabajikan. Ini menandakan bahwa meskipun berbeda agama, kita harus tetap saling menegakkan *amar makruf nahi munkar*, berakhlak mulia, tidak berbudaya saling hujat, tidak menyimpan kedengkian, tidak saling membenci, dan tidak saling curiga.³² Melalui hal ini kerukunan antarumat beragama dapat diwujudkan, terhindar dari kekerasan atau konflik antaragama, dan pada gilirannya keadilan akan terwujud.³³

Tuhan menciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian dan menganugerahkan kepada mereka kedudukan terhormat di hadapan ciptaan-Nya yang lain. Kedudukan seperti itu ditandai dengan pemberian daya pikir, kemampuan berkreasi dan kesadaran moral. Potensi itulah yang memungkinkan manusia memerankan fungsinya sebagai *kehalifah* dan hamba Allah. Kedua fungsi tersebut—dalam konteks Islam—terbingkai dalam hubungan vertikal dengan Tuhan (*ḥabl min Allāh*) dan hubungan horizontal dengan manusia (*ḥabl min al-nās*) dan makhluk lain.

Kaitannya dengan aspek *ḥabl min al-nās*, masyarakat Balun—dalam pandangan penulis—telah dengan baik mengimplementasikan dan mentransformasikan nilai-nilai humanisme dalam kehidupan mereka. Mereka, khususnya umat Islam dengan doktrin keagamaannya, menyadari bahwa tidak ada kelebihan dan kemuliaan antara satu manusia dengan manusia lain di hadapan Tuhan kecuali karena kualitas keimanan dan ketakwaan. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Karena kesadaran inilah warga Balun saling menolong, saling menghormati, bekerja sama, saling menasehati, dan saling mengajak kepada kebenaran demi kebaikan bersama.

³⁰ I Korintus [13]:4-7. Lihat dalam Sindhunata, *Pergulatan Intelektual*, 223.

³¹ Q.S. Āli-‘Imrān [3]:64.

³² Sindhunata, *Pergulatan Intelektual*, 223.

³³ “Keadilan” adalah suatu kondisi atau keadaan di mana sesuatu berada pada tempatnya yang benar dan semestinya atau keadaan keseimbangan dalam hubungannya dengan dirinya dan lainnya. Lihat Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam dan Sekularisme* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1978), 218-219.

Kerangka bersikap tersebut mengisyaratkan adanya upaya warga Balun untuk bergerak secara dinamis dan kreatif dalam kehidupan mereka. Mereka saling menghormati harkat dan martabat masing-masing, bersederajat, berlaku adil, dan mengusahakan kebahagiaan bersama. Untuk itu mereka selalu berusaha menjaga sikap keterbukaan, komunikasi, dan dialog. Usaha tersebut bahkan telah diwadahi dalam institusi non-formal, yaitu FKWB.

Catatan Akhir

Konsep pendidikan humanisme adalah pendidikan yang bertujuan memanusiakan manusia serta menjunjung harkat dan martabat manusia. Pendidikan ini juga menjadikan manusia “bebas”, dalam arti bebas untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama. Dengan demikian setiap manusia berhak menentukan pilihannya dan kebutuhannya, termasuk dalam memeluk agama. Di sisi lain manusia merupakan makhluk sosial yang berkewajiban menjaga ketertiban interaksi sosial tanpa membedakan latar belakang apapun, termasuk agama/keyakinan. Pendidikan humanisme, dengan demikian, diarahkan pada pengembangan penuh dari kepribadian manusia dan memperkuat rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang membawa pada keharmonisan hubungan umat beragama.

Tahapan-tahapan pendidikan humanisme dalam membentuk kesadaran keberagaman umat lintasagama dapat dilakukan dengan cara menerapkan nilai pendidikan yang mencakup *learning to do*, *learning to know*, *learning to be*, *learning to live together*, *learning to learn*, dan *learning to love*. Penerapan nilai-nilai tersebut yang menjadikan masyarakat Desa Balun, Kabupaten Lamongan mampu menjaga kerukunan antarumat beragama. Di desa tersebut, nilai-nilai pendidikan humanisme diimplementasikan dan ditransformasikan dengan cara kultural. Artinya, implementasi dan transformasi nilai-nilai tersebut dilakukan dengan cara non-formal, seperti melalui kerja bakti, peringatan hari-hari besar keagamaan, peringatan Hari Kemerdekaan RI. Masyarakat Desa Balun memiliki lembaga non-formal, yaitu Forum Keakraban Warga Balun (FKWB), yang dibentuk untuk menjamin keberlangsungan transformasi nilai-nilai tersebut.

Daftar Rujukan

- “Sebuah Renungan untuk Pendidikan Masa Depan”. *Majalah Widya*, Agustus, 2006.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam dan Sekularisme*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1978.
- Amar, Asrofil. “Studi Normatif Pendidikan Islam Multikultural”. *Islamica*, Vol. 4, No. 2, Maret, 2010.

- Buletin Warta Jemaat* (Greja Kristen Jawi Wetan Jemaat Lamongan), 10 Oktober 2010.
- Firdaus, Akhol. "Pembkab dan Masyarakat Menolak Pendirian Tempat Ibadah". *Buletin Syabadah*, XII, Juli, 2010.
- Forum Mangunwijaya IV, *Penjiarahan Panjang HUMANISME Mangunwijaya*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Gambaran Bentuk Objektif Ds. Balun, Kec. Turi, Kab. Lamongan* (Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Balun Kecamatan Turi Tahun 2009).
- Kunawi. "Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali". *Islamica*, Vol. 8, No. 1, September, 2013.
- Peraturan Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan No. 01 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Balun.
- Rouf, Abdul. *NU dan Civil Islam di Indonesia*. Jakarta: Intimedia, 2010.
- Rubaidi, Ahmad, et. al. *Jalan Lain Perdamaian Peace Building Berbasis Komunitas*. Surabaya: Diantama Press, 2005.
- Sindhunata, Priyanahadi. *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Kanisius: Yogyakarta, 2000.
- , *Pergulatan Intelektual dalam Era Kegelisahan*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Sugiharto, Bambang. *Humanisme dan Humaniora: Relevansinya bagi Pendidikan*. Bandung: Jelasutra, 2008.
- Sunarto, Achmad. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.

Wawancara.

- Naskan. *Wawancara*. Lamongan, 24 Januari 2011.
- Sudarjo. *Wawancara*. Lamongan, 22 & 23 Januari 2011.
- Sukambang. *Wawancara*. Lamongan, 23 Januari 2011.
- Sulastri. *Wawancara*. Lamongan, 23 Januari 2011.
- Sumiati. *Wawancara*. Lamongan, 23 Januari 2011.
- Suwito. *Wawancara*. Lamongan, 23 Januari 2011.
- Tadi. *Wawancara*. Lamongan, 23 Januari 2011.